

**IMPLEMENTASI APLIKASI ONLINE ELEKTRONIK-OFFICE  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (e-DJPb) DI KANTOR  
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MAKASSAR II**

**Yuni Amiliyani**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

**Herlina Sakawati**

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar  
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar  
Email: herlinamappakanro@gmail.com

**ABSTRAK**

*Implementasi Aplikasi Online Elektronik-Office Direktorat Jenderal Perbendaharaan (e-DJPb) Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Dibimbing Oleh Ismail dan Herlina Sakawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terimplementasinya Aplikasi e-DJPb dilihat dari aspek faktor pendukung dan implementasi kebijakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan fokus penelitian di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II dengan teknik pengumpulan data di lakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang di peroleh diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi Online e-DJPb di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II terimplementasikan dengan baik secara efektif dan efisien. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil wawancara dengan melihat indikator faktor pendukung dan implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Implementasi Aplikasi Online elektronik-Office Direktorat Jenderal Perbendaharaan (e-DJPb) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II itu terimplementasikan secara efektif dan efisien.*

*Kata Kunci : e-DJPb dan e-government*

## 1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin tinggi menyebabkan semakin canggihnya teknologi yang digunakan oleh manusia sehingga hal ini menjadi titik awalnya teknologi menjadi semakin canggih dan mutakhir, seperti adanya internet. Penggunaan teknologi komputer dewasa ini semakin meluas tentunya membantu para pelaku pelayanan publik dalam mengambil keputusan didalam operasional pemerintahan baik itu kegiatan administrasi, pelayanan, maupun dalam pengolahan data kepegawaian. Pemerintah memerlukan alat bantu yang dapat diandalkan, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan perencanaan dan pengendalian, seperti sistem informasi manajemen.

*E-government* merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan.

Sejarah pengembangan *e-government* di Indonesia sudah dimulai dari jaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Intruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, mengintruksi kepada pemerintah untuk mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*.<sup>34</sup>

*E-government* dikenal sebuah layanan untuk mendukung kegiatan perkantoran khususnya administrasi dengan nama e-perkantoran (*e-Office*). *e-Office* di Indonesia saat ini lebih banyak digunakan oleh kalangan kantor Pemerintahan, *e-Office* merupakan suatu aplikasi pendukung program Reformasi Birokrasi yang cocok untuk digunakan di lingkungan Kantor Kementerian/Instansi pemerintah/Pemerintah Daerah. Sistem ini didesain mengikuti pola dan aturan yang ada dalam sistem pemerintahan, dimana model administrasi kepegawaiannya sudah mengikuti sistem Pegawai Negeri

Sipil (PNS) di Indonesia. Aplikasi *e-Office* merupakan suatu sistem aplikasi berbasis web, bisa dijalankan dilingkungan jaringan intranet, ataupun bisa diakses dari jaringan internet kalau server yang digunakan mempunyai koneksi IP publik dengan nama domain yang terdaftar.

*E-Office* merupakan bagian dari *e-government* khususnya untuk mendukung administrasi perkantoran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *E-govenment* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan publik. *E-Office* telah diimplementasikan secara bertahap, setelah digunakan di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada semester II tahun 2017, mulai tahun 2018 digunakan oleh unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebelum adanya *e-Office*, beragam layanan ICT berbasis internet telah disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan telah dikumpulkan dalam satu direktori yaitu e-DJPBN, tujuan utama terobosan tersebut adalah mempermudah *stakeholder*.

Implementasi *e-Office* di KPPN Makassar II, dimulai dengan tahap uji coba pada bulan Januari tahun 2018 setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan video

conference yang diselenggarakan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Dengan masih dalam tahap uji coba, Apakah aplikasi *e-Office* Ditjen Perbendaharaan (e-DJPb) sudah berfungsi sepenuhnya ataukah belum?. Hal tersebut mendorong penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Implementasi Aplikasi Online Elektronik-Office** Direktorat Jenderal Perbendaharaan (e-DJPb) Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II”. Permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi aplikasi e-DJPb pada KPPN Makassar II ? dan Faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi aplikasi e-DJPb pada KPPN Makassar II ?” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat tercapai yaitu untuk mengetahui implementasi aplikasi e-DJPb digunakan pada KPPN Makassar II dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi aplikasi e-DJPb di KPPN Makassar II.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **a. Konsep Implementasi Kebijakan**

#### **1) Pengertian Implementasi Kebijakan**

Pengertian implementasi menurut Kamus Webster dalam Ali (2017:51), adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa

inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).<sup>35</sup> Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya diorganisasikan

secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Sore (2017:124) mendefinisikan implementasi kebijakan publik, adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.<sup>36</sup>

Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwatelah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program,

<sup>35</sup> Ali, Muhammad. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: Pres

<sup>36</sup> Sore, B Uddin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media, hm 124.

undang-undang publik, dan keputusan yudisial.

Grindle dalam Winarno (2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi adalah Membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*," di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan dalam kebijakan.<sup>37</sup>

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dengan adanya tujuan yang ingin direalisasikan dan adanya masalah publik yang harus diatasi, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan publik. Kebijakan ini untuk keberhasilannya tidak hanya didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan administratif, akan tetapi juga harus didasarkan atas pertimbangan etika dan moral.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang

luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno dalam Ali (2017:51)).<sup>38</sup>

Definisi tersebut mengisyaratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijaksanaan. Meter dan Horn menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya, tahap implementasi terjadi setelah proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati. Studi implementasi lebih menekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran kebijakan.

## 2) Model Implementasi Kebijakan

Sabatier dalam Akib (2008:6) , terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni "model *top down* dan model *bottom up*".<sup>39</sup> Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit,

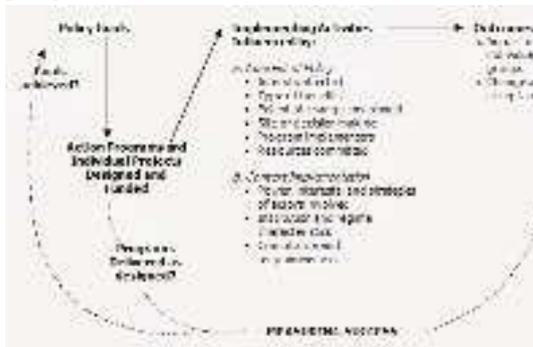
<sup>37</sup> Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.

<sup>38</sup> Ali., Loc.Cit.

<sup>39</sup> Ibid., 6.

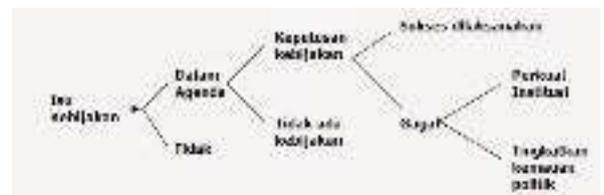
model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.



**Gambar 1**  
Implementation as a Political and Administrative Process

T.B. Smith mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Pada Gambar 1 terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program – secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.



**Gambar 2.**  
Model Linier Implementasi Kebijakan  
Pada aspek pelaksanaan

kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (lihat Baedhowi, 2004: 47). Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.



**Gambar 3**  
Model Interaktif Implementasi  
Kebijakan

Berbeda dengan model linier, model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu

dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan stakeholders. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Pada gambar 3 terlihat bahwa meskipun persyaratan input sumberdaya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan model implementasi kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan

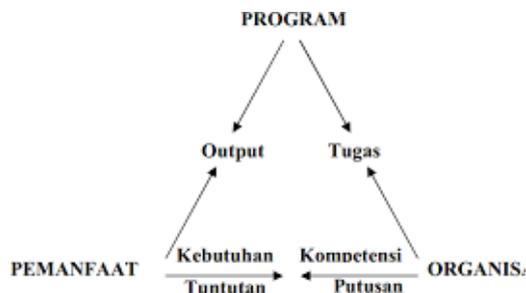
sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu, enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut Grindle mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, beserta output dan outcomenya.

Selain model implementasi kebijakan di atas Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. Keduanya menegaskan pendirian bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak

yang terlibat dalam proses implementasi.

Tanpa mengurangi kredibilitas model proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa elemen yang menentukan keberhasilan penerapannya termasuk ke dalam elemen model proses politik dan administrasi menurut Grindle. Kata kunci yakni perubahan, kontrol dan kepatuhan termasuk dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Demikian pula dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya termasuk dalam elemen isi kebijakan dan konteks implementasi menurut Grindle. Tipologi jumlah perubahan yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan dan tipologi ruang lingkup kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi.

Sejalan dengan pendapat di atas, Korten (baca dalam Tarigan, 2000: 19) membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.



**Gambar 4**

**Model Kesesuaian**

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur

program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen yang disesuaikan satu sama lain – program, pemanfaat dan organisasi – juga sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks implementasi (organisasi) maupun dalam outcomes (pemanfaat) pada model proses politik dan administrasi dari Grindle.

### **b. Konsep e-Government**

Dalam kerangka keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah daerah, *e-government* merupakan sarana bagi terhubungnya antara pemerintah dengan pemerintah, dalam hal ini berarti terhubungnya antara badan-badan publik yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Idealnya, keterhubungan yang solid antar badan publik atau Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui *e-government*. Ini akan menghasilkan data dan informasi yang tersedia atau siap diakses publik. Dengan kata lain keterhubungan antar badan publik menjadi sarana bagi keterhubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pengakses informasi.

Salah satu kunci keterhubungan ini mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, akan sangat tergantung dari ketersediaan dan keterpaduan dari semua komponen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang membangun sistem *e-government*, yaitu Infastruktur

perangkat keras dan jaringan komunikasi data yang tersedia, Infastruktur aplikasi perangkat lunak yang akan dibangun atau yang telah digunakan, kompetensi SDM aparatur pendukung dan organisasi pengelola sumber daya TIK.<sup>40</sup>

Sementara itu, *United Nations* dalam Domai (2015:44) menyatakan bahwa: *Underlying the concept of connected governance is a systematic approach to collection, reuse, and sharing of data and information* (Artinya bahwa konsep utama dari pemerintahan yang saling berhubungan adalah pendekatan yang sistematis dalam pengumpulan, penggunaan ulang, serta *sharing* data dan informasi.<sup>41</sup>

*E-government* secara umum didefinisikan sebagai suatu bentuk penerapan teknologi elektronik untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam cakupan internal dan eksternal (pelayanan umum) untuk pencapaian kinerja yang efektif, efisien, cepat dan transparan, teknologi elektronik yang digunakan keperluan ini adalah teknologi komputer dan komunikasi sehingga dikenal satu istilah teknologi informasi. Secara singkat *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat

<sup>40</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government.

<sup>41</sup> Domai, Tjahjanulin, Dkk. 2015.

*Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik.* Malang: UB Press, hlm 44.

meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain.

Hughes dalam Setyadiharja (2017:9) mendefinisikan *e-government* sebagai berikut: Sebuah term yang dapat diterjemahkan sebagai sebuah teknologi informasi, termasuk salah satunya penggunaan internet, untuk menyampaikan pelayanan publik agar mendapat kenyamanan yang lebih atau lebih berorientasi kepada pelanggan, mengurangi biaya, dan agar menjadi jalan yang lebih baik.<sup>42</sup>

Hughes dalam Setyadiharja (2017:9) melanjutkan pembahasannya pada batasan tertentu definisi *e-government* adalah “proses adopsi teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah”.<sup>43</sup>

Indrajit dalam Setyadiharja (2017:9) menjelaskan dua pengertian *e-government* sebagai berikut pertama, dari Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *e-government* sebagai berikut : *e-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.*<sup>44</sup>

Disisi lain, UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana Indrajit dalam Setyadiharja (2017:9), yaitu : “*e-government is the application of information and Communication Technology (ICT) by government agencies*”.<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi lainnya *e-government*, UNDP Sugandi dalam Setyadiharja (2017:9) bahwa *e-Gov* itu sendiri adalah Penggunaan teknologi informasi pergerakan informasi dikarenakan keterbatasan fisik seperti kertas dan sistem berdasarkan fisik secara tradisional melalui penggunaan teknologi secara terus menerus untuk mengakses dan mengirimkan pelayanan pemerintah untuk dimanfaatkan oleh warga Negara, Artinya bahwa penggunaan konsep *e-government* adalah usaha pengembangan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi.<sup>46</sup>

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II, maka dapat di simpulkan bahwa :

---

<sup>42</sup>Setyadiharja, Rendra. 2017. *e-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*. Yogyakarta: CV

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

1. Aplikasi e-DJPb sudah terimplementasikan dengan baik secara efektif dan efisien dalam penggunaannya, dikatakan efektif dan efisien karena e-DJPb mempermudah kerja pegawai salah satunya dalam hal disposisi serta pembuatan surat, bawahan tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama untuk disposisi surat dari kepala kantor. Selain efektif dan efisien, e-DJPb juga mengurangi dalam hal biaya seperti mengurangi penggunaan ATK dan tidak perlu lagi membayar pos untuk mengirim surat atau dokumen.
2. e-DJPb dalam penggunaannya efektif, efisien dan terimplementasikan dengan baik. Dapat dilihat dari faktor pendukung dan implementasinya sehingga dikatakan efektif dan efisien, ialah :
  - a) Faktor Pendukung

KPPN Makassar II sudah sangat siap dalam menerapkan *e-government*, hal ini terlihat dari pelayanannya yang merupakan salah satu bentuk menerapkan *e-government*. Pelayanan yang diberikan KPPN Makassar II kepada SATKER bisa di akses atau dilihat oleh pihak luar, KPPN Makassar II juga menerapkan pelayanan *One Stop Service*, selain itu pelayanan di KPPN Makassar II juga tanpa biaya

yang diberikan kepada stakeholder. Selain dalam hal pelayanan, infrastruktur di KPPN Makassar II yang menunjang target atau prioritas dalam pengembangan e-government telah terealisasi dengan baik, para pegawai diharuskan/diwajibkan untuk bisa mengoperasikan e-DJPb serta teknologi informasi lainnya karena di KPPN Makassar II segala sesuatunya sudah berbentuk digital, pegawai pun tidak perlu khawatir dengan tingkat keamanannya karena informasi serta data di Aplikasi e-DJPb sangat aman dan valid dengan dilindungi Undang-undang yang telah ditetapkan yaitu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Selain itu pemerintah juga berupaya melakukan agar tingkat keamanan semakin terjaga dengan menggunakan Lenganex, lenganex merupakan Undang-undang Sandi Negara yang hanya digunakan oleh para pejabat.

- b) Implementasi Kebijakan

Dalam penggunaan Aplikasi e-DJPb masing-masing pegawai memiliki user sesuai dengan tupoksi dan level otoritas pada aplikasi, berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Keuangan Nomor : SE-02/WPB.25/2018 perihal Implementasi e-DJPb pada Unit Lingkup Kantor Wilayah DJPb Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Nota Dinas dengan

Nomor : ND-8285/PB.1/2018 perihal Implementasi Digital Signature pada Aplikasi e-Office Modul Surat Keluar di lingkup Ditjen Perbendaharaan, dan Surat sekaligus User Manual masing-masing pegawai dengan nomor surat S-5804/PB.8/2018 perihal Implementasi e-DJPb pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

e-DJPb di KPPN Makassar II bukan hanya diterapkan dan digunakan begitu saja, dengan adanya e-DJPb juga memberikan banyak manfaat yang diterima oleh para pegawainya seperti dalam hal pengiriman surat tidak menggunakan jasa pos sehingga dapat menghemat biaya, mengurangi penggunaan kertas, surat masuk dan surat keluar dapat terdeteksi dengan mudah, mengurangi penggunaan ATK, pekerjaan pegawai lebih efektif dan efisien, disposisi surat lebih terpantau, kapan surat diterima serta di proses dan diselesaikan tercatat oleh sistem. Manfaat yang diterima bukan hanya ke pegawainya tetapi juga kepentingan organisasi yang bertujuan untuk menerapkan *go green* dalam hal mengurangi penebangan pohon serta pemakaian kertas dan menghemat tempat penyimpanan file.

#### **a. Implikasi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat di Kementerian Keuangan serta seluruh Lingkup Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan meningkatkan kualitas dari organisasi yaitu Lingkup Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini membuat manusia mencari inovasi-inovasi baru terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi semua kalangan dalam menerima dan menyampaikan informasi serta berkomunikasi secara efektif dan efisien. Teknologi informasi juga telah membawa kemajuan dalam pengolahan data dan informasi.

#### **a. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun beberapa saran yang direkomendasikan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar terus meningkatkan kualitas pada aplikasi *e-Office* Ditjen Perbendaharaan.
2. Mengadakan pelaporan Implementasi aplikasi *e-Office* Ditjen Perbendaharaan agar Kementerian Keuangan bisa mengetahui sejauh mana Aplikasi e-DJPb ter implementasikan dan kendala yang dialami pada organisasi sektor publik instansi vertikal dilingkungan Direktorat

Jenderal Perbendaharaan  
Kementerian Keuangan Republik  
Indonesia (RI).

## 6. Referensi

### Buku

- Ali, Muhammad. 2017, *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Annas, Aswar. 2017, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar : Celebes Media Perkasa.
- Asriel, Armida Silvia, Dkk. 2016, *Manajemen Kantor*. Jakarta: K E N C A N A
- Domai, Tjahjanulin, Hermawan & Yuliani, Leny. 2015, *Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik*. Malang: UB Press.
- Gaol, Jimmy L. 2008, *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Hutahaean, Jeperson. 2014, *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indrajit, Richardus Eko. 2016, *e-government in action*. Yogyakarta: Preinexus.
- \_\_\_\_\_ . 2006, *e-government in action*. Yogyakarta: ANDI.
- Kasemin, Kasiyanto. 2015, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: K E N C A N A.
- Marimin, Dkk. 2006, *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Miles, Mathew. B & Huberman, A Michael, Saldana, Johny. 2014, *Qualitative Data Analysis: a methodes sourcebook*. America:Arizona Atate University.
- Nuraida, Ida. 2008, *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Setyadiharja, Rendra. 2017, *e-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Eelektronik)*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Sore, Uddin B. & Sobirin. 2017, *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Sugiyono . Dr, Prof. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: ALFABETA CV.
- Sukoco, Badri Munir. 2007, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi*

*Daerah.*

Yogyakarta

:Deepublish.

Suparjati, Dkk. 2000, *Tata Usaha dan Kearsipan*. Yogyakarta: Kanisius.

### **Skripsi**

Akib, Haedar & Tarigan, Antonius. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*.

Haryanto, Budi & Nugroho, Lukito Edi, Dkk.2015. *Perancangan Sistem E-office Pemerintah Daerah Studi Kasus: Pemerintah Kota Salatiga. Seminar Nasional Ilmu Komputer*, ISBN: 978-602-1034-19-4.

Sigit Dewandaru, Dimas.2013. *Pemanfaatan Aplikasi e-Office Untuk Mendukung Penerapan e-Government Dalam Kegiatan Perkantoran Studi Kasus : Puslitbang Jalan dan Jembatan. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi*, ISSN: 2089-9815.

Sufi, Wasiah & Herlinda, Dwi. 2017. *Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru*.

### **Undang-Undang**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan e-government.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Internet**

Laman Resmi Ditjen Perbendaharaan. 2018. *BeritaImplementasi e-Office*. (Online).  
<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/> diakses tanggal 14 Juli 2018

Laman Resmi Ditjen Perbendaharaan. 2018. *implementasi e-office dalam korespondensi kedinasan di kppn makassar*. (Online)

[www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id), diakses tanggal 25 Agustus 2018. Laman Resmi Ditjen Perbendaharaan KPPN Jakarta IV. 2018. *Sosialisasi e-Office*. (Onlin)